

PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

LAPORAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TAHUN 2021



Visioner



Taat



Profesional

Perkantoran Plaza Pacific Blok B-1 No. 1
Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading
Jakarta 14240

Phone (021) 4483-5651
Email vtp@vtp.co.id
Web www.vtp.co.id

Laporan Auditor Independen
Atas Kepatuhan Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
Dan Pengendalian Intern
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
Tahun 2021

DRAFT

**PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN PENGENDALIAN INTERN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

Daftar Isi

KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- Laporan Auditor Independen
- Lingkup pengujian
- Hasil pengujian
- Tindak lanjut temuan tahun lalu

KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN

- Laporan Auditor Independen
- Temuan tahun berjalan
- Tindak lanjut temuan tahun lalu

Daftar Isi

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan Auditor Independen

I. Lingkup Pengujian

II. Hasil Pengujian

Halaman

1

2

DRAFT

I. LINGKUP PENGUJIAN

Audit yang dilaksanakan bersifat audit kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan yang berlaku bagi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Lingkup pengujian yang dilakukan diterapkan terbatas pada pasal-pasal tertentu dalam:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
2. Risalah RUPS tahun 2020.
3. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab II mengenai Laporan Tahunan Pasal 66 yang mewajibkan Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup harus menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS.
4. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan (Persero) khususnya mengenai kewajiban Direksi untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai pedoman dalam menjalankan operasi Perseroan.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU) - Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 (24/1997) tentang pendaftaran tanah.
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan.
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-13/MBU/09/2014 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap Badan Usaha Milik Negara.
11. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020
Tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007
Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.
15. Anggaran Dasar PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

II. HASIL PENGUJIAN TAHUN BERJALAN

1. KETERLAMBATAN ATAS PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Kondisi:

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas aspek perpajakan, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan UU Perpajakan (KUP) diantaranya sebagai berikut:

a. Keterlambatan Penyetoran dan pelaporan Pajak

PPh 21

Bulan	Tanggal Setor	Lama Keterlambatan	Tanggal Lapor	Lama Keterlambatan
Januari	31-Mar-21	49 hari	7-May-21	76 hari
Pebruari	4-May-21	55 hari	7-May-21	48 hari
Maret	4-May-21	24 hari	7-May-21	17 hari
April	11-Jun-21	32 hari	30-Jul-21	71 hari
Mei	27-Jul-21	47 hari	20-Aug-21	61 hari
September	11-Oct-21	1 hari	19-Oct-21	-
Desember	09-Feb-22	30 hari	13-Feb-22	24 hari

b. Belum dilakukan penyetoran dan pelaporan pajak

PPh 21

Kantor cabang belum menyetorkan dan melaporkan pajak PPh 21 Karyawan dari bulan Januari-November 2021.

Kriteria:

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 10, Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau.
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak BAB II Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Pasal 2

- PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Akibat:

Sesuai dengan UU KUP :

Pasal 7, apabila surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atas batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,

Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pasal 9 ayat 2a, Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 13 ayat 3, Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.
- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, atau,
- c. 100% (seratus persen) dari Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Rekomendasi:

Sebaiknya dilakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Tanggapan Manajemen

2. PPN WAPU BELUM DISETORKAN

Kondisi:

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap akun PPN WAPU, Cabang Bandung belum melakukan penyetoran PPN WAPU dengan rincian sebagai berikut:

201040202 PPN WAPU			
No	Bulan	Vendor	Total
1	Januari	PT.Sabba Global Logistik	18.830.654
2	September	PT Dian Samudera Utama	865.200.000
Total			884.030.654

Kriteria:

Batas waktu pembayaran/penyetoran pajak penghasilan adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Akibat:

Keterlambatan lapor pajak akan mengakibatkan denda yang akan merugikan perusahaan.

Rekomendasi:

Sebaiknya segera dilakukan penyetoran atas pajak PPN WAPU tersebut untuk menghindari perbedaan dalam sistem pajak antara pemotong dan yang dipotong pajak.

Tanggapan Manajemen:

3. WANPRESTASI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Kondisi:

Berdasarkan pemeriksaan, terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh PT VTP dalam melaksanakan kewajibannya kepada PT PPA. PT PPA telah memberikan kesempatan kepada PT VTP menyelesaikan pembayaran tunggakan kewajiban pokok, bunga, dan denda yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PPA sebagaimana Surat dari PT PPA No. S-419/PPA/DINVIR/1021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Surat Peringatan Pemenuhan Kewajiban (“Somasi/Surat Peringatan I”). Surat No. S-4952/PPA/DINVIR/1221 tanggal 3 Desember 2021 perihal Somasi/Surat Peringatan II (Kedua) dan Surat No. S-5258/PPA/DINVIR/1221 tanggal 17 Desember 2021 perihal Somasi/Surat Peringatan III (Ketiga), dengan jumlah tunggakan sebagai berikut:

No	Kewajiban	Jumlah
I	Kewajiban Pokok	23.737.608.641
II	Kewajiban Bunga	1.362.908.305
III	Kewajiban Denda	135.489.536
Total Kewajiban		25.236.006.482

Kriteria:

Adendum III Perjanjian Pemberian Pinjaman Modal Kerja Kepada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) No. 47

II. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengubah ketentuan Pasal 1 Angka (9) Perjanjian Pinjaman sehubungan dengan perpanjangan Jangka Waku Fasilitas Pinjaman, menjadi sebagai berikut:

(9) “Tanggal Jatuh Tempo” adalah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman termasuk perpanjangan yang telah disepakati Para Pihak, yaitu tanggal yang jatuh pada 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal efektif, dalam hal ini jatuh pada tanggal 1 Desember 2021.

Akibat:

Penundaan pembayaran kewajiban mengakibatkan denda yang semakin meningkat sehingga akan mempengaruhi *cashflow* masa depan.

Rekomendasi:

Sebaiknya dibuatkan kesepakatan kembali antara kedua belah pihak mengenai kemampuan dan jangka waktu pembayaran perusahaan.

Tanggapan Manajemen:

III. TINDAK LANJUT TEMUAN TAHUN LALU

1. Belum Adanya Addendum Perjanjian dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)

Kondisi:

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan perjanjian utang kepada PT KBN, dengan nomor perjanjian 6 Tanggal 27 Desember 2012.

Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa jangka waktu perjanjian sampai dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang restrukturisasi dan akuisisi, namun akuisisi Perseroan batal dilakukan dan sampai saat ini perjanjian tersebut belum dirubah/belum ada addendum.

Pada saat kami melakukan konfirmasi saldo utang Perseroan dengan PT KBN, terdapat selisih saldo dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo tercatat di VTP	Rp 30.730.681.129
- Saldo tercatat di KBN	<u>Rp 39.634.209.195</u>
Selisih	Rp 8.903.528.066

Selisih tersebut dikarenakan PT KBN mengakui perhitungan denda atas pinjaman yang dilakukan Perseroan, tanpa adanya informasi kepada Perseroan.

Kriteria:

- Kitab undang-undang perdata (KUHP) pasal 1233
Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Akibat:

Tidak terdapatnya kekuatan yang mengikat secara hukum terkait dengan hak dan kewajiban antara Perseroan dan PT KBN dan berpotensi menjadi masalah di kemudian hari.

Tanggapan Manajemen:

Sedang proses permohonan mediasi dengan Kementerian BUMN.

Rekomendasi:

Sebaiknya manajemen membuat addendum atas transaksi yang dilakukan dengan PT KBN. Selain itu, sebaiknya manajemen melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan Pihak KBN atas transaksi utang tersebut.

Tindak Lanjut:

Daftar Isi

Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern

Halaman

Laporan Auditor Independen

I. TEMUAN TAHUN BERJALAN

- | | |
|---|----|
| 1. Belum diterapkannya SOP atas Penerimaan dan Penggunaan Kas | 8 |
| 2. Proyek yang Belum Dilengkapi Kontrak | 13 |
| 3. Pengajuan Uang Muka yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan | 15 |
| 4. Penerapan SOP Pengadaan Aset Tetap yang Belum Konsisten | 17 |
| 5. Pengadaan Aset Tetap yang Tidak Masuk Anggaran RKAP | 19 |
| 6. Pengendalian Internal atas Pendapatan dan Beban | 20 |
| 7. Pengendalian Internal atas Pencatatan Perpajakan | 21 |
| 8. Penutupan KSO | 22 |

II. TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT TAHUN LALU

- | | |
|--|----|
| 1. Revaluasi Aset Tetap 2019 Belum Dilakukan Secara Keseluruhan Untuk Kelompok Aset yang Sama dan Belum Dilaporkan Pajak | 23 |
|--|----|

I. TEMUAN TAHUN BERJALAN

1. BELUM DITERAPKANNYA SOP ATAS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN KAS

Kondisi

Dari hasil pemeriksaan atas penerimaan dan penggunaan kas Perusahaan, masih terdapat transaksi secara tunai di atas ketentuan KD85/KU.207/VTP-2020, yaitu Jumlah Pengeluaran Kas kecil untuk 1 transaksi atau gabungan beberapa transaksi dengan 1 pihak penerima, maksimal sebesar Rp500.000; b). Jumlah pengeluaran di atas Rp500.000 untuk 1 transaksi atau gabungan beberapa transaksi dengan 1 pihak penerima harus menggunakan via MCM atau MIB, Cek atas nama atau bill yet giro, dengan rincian sebagai berikut:

A. Penerimaan pelunasan piutang dari konsumen/user secara kas/tunai.

Tanggal	Nama Akun	Tipe Transaksi	Keterangan	No Journal	Debit	Cabang
06-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.169	KM.01/I/21	538.858.914	BALI
06-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.175	KM.02/I/21	450.064.086	BALI
06-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.UNIserv Indo	KM.04/I/21	34.529.000	BALI
06-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI CV.GADING RIZK	KM.05/I/21	55.201.200	BALI
06-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :	KM.3/I/21	2.641.750	BALI
08-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.ARTHA LABO	KM.27/I/21	8.277.500	BALI
11-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	0001/BLI/01/2021	202.218.000	BALI
11-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	0002/BLI/01/2021	3.192.234	BALI
11-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	0003/BLI/01/2021	4.401.643	BALI
11-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.42/I/21	4.963.837	BALI
11-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.150	KM.43/I/21	4.270.944	BALI
11-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :	KM.44/I/21	4.875.386	BALI
18-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.53/I/2021	390.396.000	BALI
18-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.54/I/2021	6.753.643	BALI
18-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.55/I/2021	7.659.032	BALI
18-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.56/I/2021	3.096.000	BALI
18-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.57/I/2021	5.049.798	BALI
21-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	terima dari CV.Gading Rizky :-	0004/BLI/01/2021	67.534.250	BALI
21-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.TIGA KARYA N	0005/BLI/01/2021	3.055.927	BALI
22-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI SEGER AGRIO NU	0007/BLI/01/2021	3.316.728	BALI
22-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	0008/BLI/01/2021	47.749.308	BALI
22-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.BULUKUMBA	0009/BLI/01/2021	117.542.700	BALI
22-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI SAKA AGUNG AB	0010/BLI/01/2021	436.016.552	BALI
22-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- ORD.19	KM.85/I/21	236.099.000	BALI
22-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.KOKOH MANI	KM.89/I/21	1.776.782	BALI
25-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.120/I/21	3.901.600	BALI
29-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.149/I/21	129.295.050	BALI
29-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.MULYA INVES	KM.150/I/21	106.435.000	BALI
29-Jan-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.PUUK KALIM	KM.151/I/21	8.500.000	BALI
05-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.167/II/21	269.841.000	BALI
05-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.ARTHA LABO	KM.170/II/21	5.040.000	BALI
11-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.196/II/21	109.600.000	BALI
16-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.010	KM.203/II/21	2.746.000	BALI
16-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.204/II/21	5.856.518	BALI
16-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.205/II/21	2.827.550	BALI
16-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.010	KM.206/II/21	3.017.550	BALI
16-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT TIGA KARYA N	KM.207/II/21	3.349.679	BALI
25-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT SAA :- DN.010	KM.239/II/21	277.570.660	BALI
25-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA:- DN.014	KM.240/II/21	1.645.000	BALI
25-Feb-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AAGUN	KM.240/II/21,	235.486	BALI
03-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.BULU KUMBA	KM.282/III/21	50.000.000	BALI
03-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.282/III/21,	50.000.000	BALI
03-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TEIMA DARI PT.SAKA AGUNG A	KM.283/III/21	3.546.050	BALI
05-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.020	KM.297/III/21	390.656.663	BALI
05-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.298/III/21	48.301.000	BALI
10-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.022	KM.316/III/21	1.734.500	BALI
10-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.021	KM.317/III/21	1.176.500	BALI
10-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.018	KM.318/III/21	2.294.578	BALI
10-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.319/III/21	330.000	BALI
10-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.PUUK KALTI	KM.320/III/21	6.016.612	BALI
18-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.KOKOH MANI	KM.327/III/21	880.491	BALI
23-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.339/III/21	5.585.000	BALI
26-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.370/III/21	225.858.750	BALI
28-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- KWT.03	KM.392/III/21	136.786.902	BALI

28-Mar-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.393/III/21	323.213.098	BALI
07-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SARANA BAN	KM.435/III/21	4.655.700	BALI
12-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.445/III/21	242.478.142	BALI
12-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.446/III/21	527.521.858	BALI
16-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.453/IV/21	5.891.000	BALI
16-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima Dari PT.Pelindo III :- DN	KM.454/III/21	150.000.000	BALI
19-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT SAKA AGUNG	KM.465/IV/21	184.801.050	BALI
19-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERINA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.466/III/21	1.368.500	BALI
19-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.467/III/21	2.569.500	BALI
21-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.486/IV/21	125.034.417	BALI
21-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.487/IV/21	43.135.083	BALI
21-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.488/IV/21	2.213.000	BALI
21-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.489/IV/21	2.829.348	BALI
21-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI TIGA KARYA MUL	KM.490/IV/21	3.161.928	BALI
26-Apr-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.515/IV/21	20.000.000	BALI
04-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.550/V/21	305.000.000	BALI
17-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.566/V/21	8.444.400	BALI
17-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI CV.GADING RISK	KM.567/V/21	40.615.400	BALI
18-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KK.589/V/21	85.000.000	BALI
31-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.KOKOH MAND	KK.709/V/21	1.508.174	BALI
31-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KK.712/V/21	2.001.000	BALI
31-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.VARIA USAHA	KK.715/V/21	80.000.000	BALI
31-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.VARIA USAHA	KM.708/V/21	6.690.492	BALI
31-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SEGER AGRO	KM.710/V/21	12.927.557	BALI
31-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.711/V/21	4.165.000	BALI
31-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.713/V/21	2.112.294	BALI
31-May-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.714/V/21	3.248.750	BALI
07-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.739/VI/21	101.964.861	BALI
09-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.CANDARA WI	KM.771/VI/21	6.296.275	BALI
11-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.782/VI/21	1.541.000	BALI
11-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DAARI PT.SAKA AGUN	KM.783/VI/21	4.529.293	BALI
11-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.784/VI/21	960.000	BALI
14-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.801/VI/21	1.560.003	BALI
24-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.818/VI/21	6.445.760	BALI
24-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Pelindo III:- DN	KM.819/VI/21	41.180.000	BALI
30-Jun-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.868/VI/21	2.264.000	BALI
12-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- KWT.11	KM.903/VII/21	7.137.610	BALI
13-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.919/VII/21	13.801.650	BALI
15-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.PELINDO III :-	KM.925/VII/21	300.000.000	BALI
19-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.PELINDO III :-	KM.954/VII/21	8.236.000	BALI
19-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.KOKOH MAND	KM.955/VII/21	1.759.675	BALI
19-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.958/VII/21	1.483.500	BALI
19-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.959/VII/21	4.155.000	BALI
29-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.987/VII/21	1.403.782	BALI
31-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SEGER AGRO	KM.1003/VI/21	11.886.477	BALI
31-Jul-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SEGER AGRIO	KM.1003/VII/21	4.982.798	BALI
06-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.1049/VIII/21	3.514.250	BALI
16-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.1055/VIII/21	3.878.000	BALI
16-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.KOKOH MAND	KM.1056/VIII/21	1.048.275	BALI
18-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.VARIA USAHA	KM.1088/VIII/21	252.159.212	BALI
18-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.TIGA KARYA N	KM.1089/VIII/21	3.161.928	BALI
18-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.1090/VIII/21	1.483.500	BALI
18-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.1091/VIII/21	2.893.203	BALI
18-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.1092/VIII/21	3.827.857	BALI
19-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.1104/VIII/21	4.627.000	BALI
24-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.VARIA USAHA	KM.1115/VIII/21	6.425.920	BALI
30-Aug-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1160/VIII/21	11.129.300	BALI
09-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1197/IX/21	3.726.000	BALI
09-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Waskita Karya :	KM.1198/IX/21	100.000	BALI
15-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1233/IX/21	15.946.000	BALI
15-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1236/IX/21	3.667.500	BALI
15-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1237/IX/21	5.499.807	BALI
15-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1238/IX/21	4.268.892	BALI
15-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.saka Agung Ab	KM.1239/IX/21	1.567.489	BALI
22-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Seger Agrio Nu	KM.1257/IX/21	5.551.433	BALI
22-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1258/IX/21	460.000	BALI
22-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Varia Usaha Dha	KM.1259/IX/21	5.481.746	BALI
22-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Mandiri Sejaht	KM.1260/IX/21	2.337.887	BALI
27-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1299/IX/21	3.832.000	BALI
29-Sep-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1325/IX/21	6.793.600	BALI
11-Oct-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1340/X/21	1.207.500	BALI
15-Oct-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Ab	KM.1370/X/21	1.747.000	BALI

15-Oct-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1371/X/21	1.972.000	BALI
15-Oct-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1372/X/21	4.553.832	BALI
15-Oct-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Kokoh Mandiri	KM.1373/X/21	1.130.208	BALI
22-Oct-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Varia Usaha Dha	KM.1388/X/21	66.429.800	BALI
22-Oct-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.saka Agung Aba	KM.1389/X/21	1.938.000	BALI
31-Oct-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1419/X/21	1.943.500	BALI
18-Nov-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1453/XI/21	3.609.500	BALI
18-Nov-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1454/XI/21	3.733.767	BALI
18-Nov-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1455/XI/21	1.710.000	BALI
18-Nov-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Tiga Karya Muly	KM.1456/XI/21	2.874.480	BALI
25-Nov-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1486/XI/21	4.202.500	BALI
15-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1517/XII/21	3.260.725	BALI
15-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.SAA :- DN.139,C	KM.1518/XII/21	1.341.900	BALI
15-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1519/XII/21	3.478.974	BALI
15-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1520/XII/21	3.517.500	BALI
15-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1521/XII/21	1.903.500	BALI
15-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Kokoh Mandiri	KM.1522/XII/21	816.516	BALI
15-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAA :- DN.140	KM.1522/XII/21.	693.000	BALI
27-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1538/XII/21	1.978.843	BALI
27-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.SAA :- DN.163,C	KM.1539/XII/21	3.054.000	BALI
27-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.SAA :- DN.160,C	KM.1540/XII/21	1.914.011	BALI
31-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Varia Usaha bah	0049/BLI/12/2021	48.437.650	BALI
31-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1555/XII/21	1.680.000	BALI
31-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1584/XII/21	2.785.250	BALI
31-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Saka Agung Aba	KM.1585/XII/21	2.376.515	BALI
31-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	Terima dari PT.Varia Usaha Seg	KM.1586/XII/21	6.424.039	BALI
31-Dec-21	Kas Cabang Bali	Penerimaan Pe	TERIMA DARI PT.SAKA AGUNG	KM.1591/XII/21	3.183.815	BALI
28/01/2021	as Cabang Bengkulu	Penerimaan	PENARIKAN UANG MUKA PEKERJA	0023/BKL/01/2021	7.361.500	BENGGKULU
28/07/2021	as Cabang Bengkulu	Penerimaan	Penarikan Uang muka Pekerja	0114/BKL/07/2021	9.672.300	BENGGKULU
31/08/2021	as Cabang Bengkulu	Penerimaan	Penarikan Uang Muka Pekerja	0139/BKL/08/2021	4.734.000	BENGGKULU
27/09/2021	as Cabang Bengkulu	Penerimaan	Penarikan Uang Muka Pekerja	0149/BKL/09/2021	17.634.500	BENGGKULU
19/10/2021	as Cabang Bengkulu	Penerimaan	Penarikan Uang Muka Operasi	0174/BKL/10/2021	7.062.000	BENGGKULU
24/11/2021	as Cabang Bengkulu	Penerimaan	Penarikan Uang Muka Operasi	0206/BKL/11/2021	4.694.425	BENGGKULU
25/05/2021	as Cabang Bandung	Penerimaan	Menarik Uang Muka pekerjaar	0420/BDG/05/2021	8.000.000	BANDUNG
19/11/2021	as Perwakilan Jambi	Penerimaan	Penarikan uang muka pekerja	0189/JMB/11/2021	1.901.955	JAMBI
04/10/2021	as Perwakilan Jambi	Penerimaan	Penarikan uang muka biaya op	0176/JMB/10/2021	10.428.000	JAMBI
25/08/2021	as Perwakilan Jambi	Penerimaan	Penarikan uang muka Pekerja	0146/JMB/08/2021	4.000.000	JAMBI
04/08/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0422	1545/LPG/08/2021	2.225.491	LAMPUNG
04/08/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0409	1544/LPG/08/2021	1.100.000	LAMPUNG
04/08/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0396	1543/LPG/08/2021	1.600.000	LAMPUNG
04/08/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0404	1534/LPG/08/2021	9.127.000	LAMPUNG
04/08/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0424	1532/LPG/08/2021	11.019.136	LAMPUNG
04/08/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0411	1531/LPG/08/2021	5.000.000	LAMPUNG
30/07/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0389	1526/LPG/07/2021	3.000.000	LAMPUNG
30/07/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0412	1525/LPG/07/2021	5.773.834	LAMPUNG
30/07/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0410	1523/LPG/07/2021	2.225.491	LAMPUNG
30/07/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0393	1521/LPG/07/2021	2.300.000	LAMPUNG
30/07/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0399	1519/LPG/07/2021	1.401.185	LAMPUNG
30/07/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka BK.0252	1510/LPG/07/2021	8.484.520	LAMPUNG
31/05/2021	as Cabang Medan	Penerimaan	Terima Kembali Uang Muka at	0233/MDN/05/2021	56.500.000	MEDAN
30/04/2021	as Cabang Medan	Penerimaan	Terima Kembali Uang Muka at	0176/MDN/04/2021	57.406.909	MEDAN
31/03/2021	as Cabang Medan	Penerimaan	Terima Kembali Uang Muka at	0121/MDN/03/2021	69.727.501	MEDAN
31/01/2021	as Cabang Medan	Penerimaan	Menarik Uang Muka Dib. Expo	0013/MDN/01/2021	43.867.760	MEDAN
31/01/2021	as Cabang Medan	Penerimaan	Menarik Kembali Uang Muka	0011/MDN/01/2021	7.613.000	MEDAN
27/03/2021	as Cabang Padang	Penerimaan	Penarikan uang muka angkuta	0102/PDG/03/2021	38.438.240	PADANG
27/03/2021	as Cabang Padang	Penerimaan	Penarikan uang muka angkuta	0094/PDG/03/2021	7.534.960	PADANG
27/02/2021	as Cabang Padang	Penerimaan	Penarikan Uang Muka angkuta	0078/PDG/02/2021	34.854.720	PADANG
27/02/2021	as Cabang Padang	Penerimaan	Penarikan Uang Muka export	0066/PDG/02/2021	20.196.360	PADANG
27/02/2021	as Cabang Padang	Penerimaan	Penarikan Uang Muka angkuta	0064/PDG/02/2021	19.408.640	PADANG
27/02/2021	as Cabang Padang	Penerimaan	Penarikan Uang Muka export	0057/PDG/02/2021	10.981.200	PADANG
29/01/2021	as Cabang Padang	Penerimaan	Penyelesaian Uang Muka pada	0019/PDG/01/2021	10.077.600	PADANG
17/03/2021	as Cabang Palembang	Penerimaan	Menarik kembali uang muka a	0830/PLG/03/2021	8.460.000	PALEMBANG
17/03/2021	as Cabang Palembang	Penerimaan	Menarik kembali uang muka a	0828/PLG/03/2021	3.300.000	PALEMBANG
13/01/2021	as Cabang Bengkulu	Penerimaan	PENARIKAN UANG MUKA PEKERJA	0020/BKL/01/2021	25.804.800	BENGGKULU
13/01/2021	as Cabang Bengkulu	Penerimaan	PENARIKAN UANG MUKA PEKERJA	0019/BKL/01/2021	39.815.550	BENGGKULU
28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka (ADENA	2435/LPG/12/2021	75.436.896	LAMPUNG
28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka (ADENA	2434/LPG/12/2021	10.000.000	LAMPUNG
28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka (ADENA	2433/LPG/12/2021	10.000.000	LAMPUNG
28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka (ADENA	2432/LPG/12/2021	75.000.000	LAMPUNG
28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka (ADENA	2431/LPG/12/2021	75.000.000	LAMPUNG
28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang Muka (ADENA	2430/LPG/12/2021	43.393.856	LAMPUNG
28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan uang muka pembel	2410/LPG/12/2021	1.700.000	LAMPUNG
28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan uang muka pembel	2409/LPG/12/2021	4.000.000	LAMPUNG

28/12/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan uang muka pembeli	2409/LPG/12/2021	4.000.000	LAMPUNG
15/11/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan uang muka pembeli	2209/LPG/11/2021	2.000.000	LAMPUNG
24/08/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan uang muka pembeli	1629/LPG/08/2021	5.000.000	LAMPUNG
07/07/2021	as Cabang Lampung	Penerimaan	Penarikan Uang muka pembeli	1399/LPG/07/2021	4.000.000	LAMPUNG
Grand Total					8.630.284.180	

B. Penggunaan/pengeluaran kas yang melebihi Batasan pengeluaran kas secara tunai untuk pembayaran uang muka, biaya Operasional dan utang usaha dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	Tanggal	Kode Vouche	Tipe Transaksi	Keterangan	Kredit	Cabang
Kas Cabang Bali	21-Jan-21	KK.76/I/21	Pembayaran Pe	BIAYA ANGKUTAN :- ORD#003/INK/LE	23.842.050	BALI
Kas Cabang Bali	21-Jan-21	KK.78/I/21,,,	Pembayaran Pe	U//M OPERASIONAL :- ORD.009/INK/4	113.000.000	BALI
Kas Cabang Bali	22-Jan-21	KK.106/I/21,	Pembayaran Pe	Bi aya B/M :ORD#127/INK/BMU/VIII/2	101.574.000	BALI
Kas Cabang Bali	25-Feb-21	KK.259/II/21	Pembayaran Pe	U/M DERMAGA,PAS DAN STEVADOR :-	116.335.000	BALI
Kas Cabang Bali	25-Feb-21	KK.262/II/21	Pembayaran Pe	U/M OPERASIONAL :- ORD.023/INK/C	200.000.000	BALI
Kas Cabang Bali	05-Mar-21	KK.312/III/21	Pembayaran Pe	ONGKOS ANGKUTAN :- ORD#227/INK	38.482.000	BALI
Kas Cabang Bali	23-Mar-21	KK.342/III/21	Pembayaran Pe	UANG MUKA OPERASIONAL :- ORD#23	113.798.500	BALI
Kas Cabang Bali	26-Mar-21	KK..387/III/2	Pembayaran Pe	U/M OPERASIONAL :- ORD#39/INK/SF	180.000.000	BALI
Kas Cabang Bali	12-Apr-21	KK.450/III/21	Pembayaran Pe	UANG MUKA OPERASIONAL :- ORD.47	150.000.000	BALI
Kas Cabang Bali	12-Apr-21	KK.450/III/21	Pembayaran Pe	UANG MUKA OPERASIONAL :- ORD.48	600.000.000	BALI
Kas Cabang Bali	16-Apr-21	KK.461/III/21	Pembayaran Pe	BIAYA ANGKUTAN:- ORD#043/INK/LE	393.800.000	BALI
Kas Cabang Bali	16-Apr-21	KK.455/IV/21	Pembayaran Pe	BIAYA BBM PREMI RITASI SOPIR :- KW	13.310.000	BALI
Kas Cabang Bali	08-Jan-21	KK.37/I/21	Pembayaran	BEBAN GUDANG PENYANGGA	13.212.000	BALI
Kas Cabang Bali	25-Jan-21	KK.136/I/21	Pembayaran	SPARE PARTS TRUCK	11.550.000	BALI
Kas Cabang Bali	05-Feb-21	KK.172/II/21	Pembayaran	SPARE PARTS TRUCK	16.518.000	BALI
Kas Cabang Bali	05-Feb-21	KK.187/II/21	Pembayaran	Biaya Gd Penyangga Pelindo - P P N	13.220.000	BALI
Kas Cabang Bali	25-Mar-21	KK.366/III/21	Pembayaran	BIAYA GD PENYANGGAN :- PT.PELIND	13.220.000	BALI
Kas Cabang Bali	28-May-21	KK.702/IV/21	Pembayaran	BAYAR SEWA GUDANG PENYANGGA	13.329.090	BALI
Kas Cabang Bali	14-Jun-21	KK.803/VI/21	Pembayaran	SPARE PARTS TRUCK TRUCK	10.455.000	BALI
Kas Cabang Bali	16-Aug-21	KK.1070/VIII	Pembayaran	Sewa Gudang Penyangga di Pel. Carik	36.197.500	BALI
Kas Cabang Bali	31-Oct-21	KK.1440/X/2	Pembayaran	Sewa Gudang Penyangga	36.197.500	BALI
Kas Cabang Medan	27-Feb-21	0080/MDN/0	Pembayaran	Biaya Bongkar Merk & Pemaletan bul	15.762.501	MEDAN
Kas Cabang Medan	31-Mar-21	0146/MDN/0	Pembayaran	ANG/Biaya Langsir Cont.Empty/Full E	15.541.503	MEDAN
Kas Cabang Medan	11-Oct-21	0367/MDN/1	Pembayaran	PBB Gudang Teh Kota Bangun tahun 2	12.208.047	MEDAN
Kas Cabang Medan	31-Jan-21	0024/MDN/0	Pembayaran	ANG/Biaya Langsir Empty Full Export	11.450.000	MEDAN
Kas Cabang Medan	27-Feb-21	0074/MDN/0	Pembayaran	PGD/Biaya Bongkar Muat Pupuk & Op	10.803.250	MEDAN
Kas Cabang Medan	30-Apr-21	0213/MDN/0	Pembayaran	PGD/Biaya Bongkar Merk dan Pemale	10.209.087	MEDAN
Kas Cabang Bandung	05-May-21	0371/BDG/05	Pembayaran	Uang muka operasional pekerjaan im	240.000.000	BANDUNG
Kas Cabang Bandung	25-Jun-21	0508/BDG/06	Pembayaran	Uang Muka Biaya Operasional atas Pe	229.000.000	BANDUNG
Kas Cabang Padang	29-Jan-21	0029/PDG/01	Pembayaran	Uang Muka ongkos angkutan karet PT	24.260.800	PADANG
Kas Cabang Padang	21-Jan-21	0015/PDG/01	Pembayaran	Uang Muka biaya pelaksanaan export	10.981.200	PADANG
Kas Cabang Padang	15-Jan-21	0008/PDG/01	Pembayaran	Uang Muka ongkos angkutan karet PT	19.408.640	PADANG
Kas Cabang Padang	15-Jan-21	0007/PDG/01	Pembayaran	Uang Muka biaya pelaksanaan export	11.190.000	PADANG
Grand Total					2.818.855.668	

Kriteria

KD.85/KU.207/VTP-2020 TENTANG “PROSES DAN PROSEDUR PENGELUARAN DAN PENERIMAAN KAS DAN BANK

- **BAB 1 “KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAN BANK KANTOR REGIONAL DAN CABANG” Point 3 “Batasan Jumlah Pengeluaran Kas dan Bank” a).** Jumlah Pengeluaran Kas kecil untuk 1 transaksi atau gabungan beberapa transaksi dengan 1 pihak penerima, maksimal sebesar Rp500.000; **b).** Jumlah pengeluaran di atas Rp500.000 untuk 1 transaksi atau gabungan beberapa transaksi dengan 1 pihak penerima harus menggunakan via MCM atau MIB, Cek atas nama atau bill yet giro.
- **BAB 1 “KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAN BANK KANTOR REGIONAL DAN CABANG” Point 4 “Penerimaan kas dan bank” e).** Tidak diperkenankan melaksanakan penerimaan dalam bentuk tunai kecuali pengisian dana kas dan pengembalian kelebihan uang muka kerja.
- **BAB 1 “KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAN BANK KANTOR REGIONAL DAN CABANG” Point 8 “Kas kecil” b.2)** Tidak untuk kegiatan operasional atau usaha.
- **BAB II “KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAN BANK**

KANTOR REGIONAL DAN CABANG” Point 2f Staf keuangan mengarsip Bukti Penerimaan Kas dan Bank pada odner Penerimaan Kas.

KD.52/KU.207/VTP-2015 TETANG “PROSES DAN PROSEDUR PENGELUARAN DAN PENERIMAAN UANG

- **Pasal 4 “Pemegang Uang”** Orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menerima, mengeluarkan dan menyimpan uang atas perintah yang berwenang, maksimal uang yang boleh dikuasai oleh kasir Rp10.000.000, dipergunakan untuk kebutuhan mendesak dan bersifat insidental. Jumlah uang diatas Rp10.000.000 harus disetorkan ke Bank Perusahaan.
- **Pasal 9 “Proses dan Prosedur Pengeluaran Uang”** Point 3 “Batasan Pengeluaran” Pembayaran kepada mitra kerja/vendor, supplier dan pihak ketiga sedapatnya ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan, namun apabila kondisi tidak memungkinkan maka:
 - Pengeluaran tunai sampai dengan Rp10.000.000 dilakukan dibayar tunai
 - Pengeluaran diatas Rp10.000.000 kepada pihak ketiga dilakukan pembayaran per cek dan per bill yet giro;
 - Pengeluaran menggunakan cek dan billyet giro sampai dengan Rp50.000.000 ditanda tangani salah satu direksi
 - Pengeluaran diatas Rp50.000.000 ditanda tangani 2 direksi; sesuai dengan kesepakatan dengan Bank
- **Pasal 19 “Pemegang Uang”** Maksimal uang yang boleh dikuasai kasir Rp5.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan mendesak dan bersifat insidental. Jumlah uang diatas Rp5.000.000 harus disetor ke Bank Perusahaan.

Akibat

Berpotensinya penyalahgunaan hasil penerimaan dan pengeluaran yang dibayarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Rekomendasi

Manajemen kantor cabang sebaiknya mulai mengikuti SOP yang sudah ditetapkan.

Tanggapan Manajemen

Mohon manajemen memberikan tanggapan atas temuan ini.

2. PROYEK YANG BELUM DILENGKAPI KONTRAK

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengendalian internal atas penjualan, tidak ditemukan pengarsipan dan tidak dilengkapi dengan perikatan resmi (Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian) oleh pihak Regional IV-Bali. Ketidaklengkapan dokumen perikatan resmi yang tidak dimiliki oleh pihak Regional IV-Bali dapat menimbulkan resiko masalah pada masa penagihan piutang dikemudian hari. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelanggan	Penjualan s.d 31 Okt 2021	%
1	CV. Gading Rizky	289.996.320	1,09%
2	CV. Kokoh Sejahtera Cakra	56.606.850	0,21%
3	PT. Mandiri Sejahtera Abadi Line	951.053.685	3,56%
4	PT. Benoa Jaya, Pelabuhan Ben	2.000.000	0,01%
5	PT. Bulukumba, Mataram	145.454.000	0,54%
6	PT. Fajar Insan Nusantara	119.297.500	0,45%
7	PT. Kokoh Mandiri Sejahtera Matara	369.269.545	1,38%
8	PT. Mulya Investama Sejahtera, Sumbawa – Binee	444.256.790	1,66%
9	PT. Seger Agrio Nusantara	572.458.915	2,14%
10	PT. Tiga Karya Mulya	617.456.270	2,31%
11	PT. Varia Usaha Segara	3.214.866.500	12,04%
12	PT. Aliet Sakata Rahayu	40.961.340	0,15%
13	RT. Artha Labora Bali	13.317.500	0,05%
14	PT. Candara Wijaya Sarana	6.296.275	0,02%
15	PT. Gamana Maka Phala	137.687.500	0,52%
16	PT. Pelindo III (Persero) Lembar	823.850.000	3,08%
17	PT. Sarana Bandar Nasional	4.655.700	0,02%
18	PT. Segar Agro Nusantara	1.309.239.610	4,90%
19	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	57.413.750	0,21%
	Total	9.176.138.049	

Kriteria

Dasar dari transaksi dengan instansi adalah surat perikatan kerja. Dimana surat perikatan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengatur terkait tentang hak dan kewajiban kedua pihak.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - PSAK 72 menyatakan suatu entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan barang dan jasa yang di transfer kepada pelanggan dalam suatu jumlah menggambarkan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Dalam PSAK 72 terdapat model 5 tahap biaya dalam pengakuan pendapatan yang terdiri dari:

- Mengidentifikasi kontrak
- Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan
- Menentukan harga transaksi
- Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
- Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan

Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kemampuan memaksa permasalahan hukum hak dan kewajiban dalam suatu kontrak adalah Kontrak dapat ditulis, lisan atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas.

Dalam ruang lingkup PSAK 72 dapat ditegakkan secara sah dan memenuhi seluruh kriteria berikut:

- Kemungkinan besar imbalan dapat ditagih

- b. Hak atas barang atau jasa dan ketentuan pembayaran dapat diidentifikasi
- c. Memiliki substansi komersil
- d. Disetujui dan para pihak berkomitmen atas kewajiban masing-masing

SP/MKT/003 TANGGAL 1 JULI 2020 TENTANG “STANDAR PROSEDUR PENJUALAN”

VI. URAIAN PROSEDUR

Apabila telah ada kesepakatan, diserahkan ke bagian pemasaran untuk dibuatkan kontrak, SPK (SPK/Kontrak/Internal). Apabila tidak ada kontrak/SPK, maka persetujuan dituangkan di dalam Surat Penawaran Harga (F/MKT/08/Rev.00)

Akibat

Transaksi berpotensi bermasalah di kemudian hari.

Rekomendasi

Sebaiknya untuk transaksi yang signifikan dibuatkan SPK atau Kontrak sebagai dasar kontrak payung atas transaksi perusahaan.

Tanggapan Manajemen

Mohon manajemen memberikan tanggapan atas temuan ini.

3. PENGAJUAN UANG MUKA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap akun uang muka, Terdapat pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka yang tidak sesuai ketentuan SOP yang berlaku serta kurang tertibnya pengarsipan pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka, dimana jumlah pengeluaran kas untuk 1 transaksi atau gabungan beberapa transaksi dengan 1 pihak penerima melebihi Rp500.000 yang merupakan batas maksimal pengeluaran kas secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Muka Pembelian									
Tanggal	Kode Voucher	Keterangan	Nominal	SPK	Bukti Pengeluaran	Daftar Rencana Pembayaran (CF)	Invoice	Bukti Transfer	Berita Acara Penyelesaian
21-Jan-21	KK.78/I/21	ORD#008/INK/LEM/I/21,KM.PER	49.000.000	x	x	x	x	x	x
21-Jan-21	KK.78/I/21,	ORD.231/INK/CBW/XII/20,KM.PE	100.939.500	x	x	x	x	x	x
21-Jan-21	KK.78/I/21,,	ORD.227/INK/CBW/XII/30,KM.CH	90.378.500	x	x	x	x	x	x
21-Jan-21	KK.78/I/21,,,,	ORD.009/INK/CBW/I/21,KM.KAS	113.000.000	x	x	x	x	x	x
21-Jan-21	KK.82/I/21	ORD.227/INK/CBW/XII/20,KM.CH	39.623.000	x	x	x	x	x	x
Uang Muka Operasional									
Tanggal	Kode Voucher	Keterangan	Nominal	SPK	Bukti Pengeluaran	Daftar Rencana Pembayaran (CF)	Invoice	Bukti Transfer	Berita Acara Penyelesaian
31-Aug-21	JU.0384/08/202	BLI Memindah Bukukan Uang Muka	121.850.393	x	x	x	x	x	x
17-Feb-21	0091/02/2021/N	UM.EXP/Biaya Export Teh Bulan F	26.400.000	x	x	x	x	x	x
14-Jan-21	0014/01/2021/N	UM.EXP/Biaya Operasional Export	14.000.000	x	x	x	x	x	x
30-Apr-21	0337/BDG/04/2	Biaya pengawasan pembongkaran	22.657.170	x	v	v	v	x	x
30-Jun-21	0533/BDG/06/2	Pembelian Spanduk, Sticker, dan	22.525.000	x	v	x	v	x	x
30-Jun-21	0534/BDG/06/2	Biaya Koordinasi persiapan pemb	7.515.215	x	v	x	v	x	x
30-Jun-21	0536/BDG/06/2	Biaya pembuatan kaos, helm, ron	35.420.000	x	v	x	v	x	x
30-Jun-21	0537/BDG/06/2	Biaya dalam rangka pekerjaan im	50.000.000	x	v	x	x	x	x
30-Jun-21	0538/BDG/06/2	Rental dalam rangka pekerjaan In	5.400.000	x	v	x	v	x	x
30-Jun-21	0540/BDG/06/2	Biaya Koordinasi Persiapan Pemb	36.000.000	x	v	x	x	x	x
30-Jul-21	JU.0234/07/202	Biaya survey lokasi persiapan per	74.317.272	x	v	v	v	x	x
30-Jul-21	JU.0236/07/202	Biaya Koordinasi persiapan pemb	37.500.000	x	v	x	x	x	x
30-Jul-21	JU.0237/07/202	Biaya Koordinasi persiapan pemb	7.500.000	x	v	x	v	x	x
30-Jul-21	JU.0245/07/202	Biaya survey lokasi/jalur dari Pel.	18.881.099	x	v	v	v	x	x

Kriteria

KD.85/KU.207/VTP-2020 TENTANG “PROSES DAN PROSEDUR PENGELUARAN DAN PENERIMAAN KAS DAN BANK

- **BAB 1 “KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAN BANK KANTOR REGIONAL DAN CABANG” Point 3 “Batasan Jumlah Pengeluaran Kas dan Bank” a).** Jumlah Pengeluaran Kas kecil untuk 1 transaksi atau gabungan beberapa transaksi dengan 1 pihak penerima, maksimal sebesar Rp500.000; **b).** Jumlah pengeluaran di atas Rp500.000 untuk 1 transaksi atau gabungan beberapa transaksi dengan 1 pihak penerima harus menggunakan via MCM atau MIB, Cek atas nama atau bill yet giro.
- **BAB 1 “KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAN BANK KANTOR REGIONAL DAN CABANG” Point 8 “Kas kecil” b.2)** Tidak untuk kegiatan operasional atau usaha.
- **BAB 2 “KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAN BANK KANTOR REGIONAL DAN CABANG” Point 3 “Pembayaran Uang Muka dan Termin” d)** formulir yang dipergunakan.

Berdasarkan surat keputusan Direksi nomor KD.52/KU.207/VTP-2015 tentang Proses dan Prosedur Pengeluaran dan Penerimaan Uang, **Pasal 12 (4)** menyatakan bahwa pengeluaran uang muka dibayarkan yang pekerjaannya sudah selesai, harus segera dipertanggung jawabkan 2 x 24 jam (dua hari kerja) walaupun belum seluruh biaya dibayar lunas (msih terhutang); (5) Apabila penerimaan uang muka tidak dapat dipertanggung jawabkan dikenakan sanksi (tuntutan ganti rugi) sesuai ketentuan Perusahaan. **Pasal 9 “Proses dan Prosedur Pengeluaran Uang” Point 3 “Batasan Pengeluaran”** Pembayaran kepada mitra kerja/vendor, supplier dan pihak ketiga sedapatnya ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan, namun apabila kondisi tidak memungkinkan maka:

- Pengeluaran tunai sampai dengan Rp10.000.000 dilakukan dibayar tunai
- Pengeluaran diatas Rp10.000.000 kepada pihak ketiga dilakukan pembayaran per cek dan per bill

- yet giro.
- Pengeluaran menggunakan cek dan bilyet giro sampai dengan Rp50.000.000 ditanda tangani salah satu direksi.
 - Pengeluaran diatas Rp50.000.000 ditanda tangani 2 direksi; sesuai dengan kesepakatan dengan Bank.

Berdasarkan SK.KD85 Tentang Cara Pembayaran Uang Muka:

- Pelanggan menyampaikan Kontrak.SPK, Invoice/kwitansi dan Jaminan Bank (Asli dan tembusan) atau Berita Acara Pemyesaina Prestasi yang diisyaratkan dalam SPK/Kontrak kepada Staf Keuangan.
- Staf Keuangan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen, selanjutnya membuat Bukti Pengeluaran Kas dan Bank.
- Staf keuangan mangajukan bukti pengeluaran kas kepada manajer pemasaran dan adminitrasi untuk diverifikasi dengan tambahan informasi berupa, daftar rencana pembayaran (Cash Flow), dan cetakan saldo akhir rekening bank.

Akibat

Terjadi *understated* biaya dan adanya potensi penggunaan kas yang tidak sesuai peruntukannya

Rekomendasi

Sebaiknya manajemen melakukan pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka sesuai dengan aturan SKD

Tanggapan Manajemen

Mohon manajemen memberikan tanggapan atas temuan ini.

4. PENERAPAN SOP PENGADAAN ASET TETAP YANG BELUM KONSISTEN

A. Pengadaan Aset dengan Nilai Diatas Rp 10.000.000 Tidak Tercatat Sebagai Aset

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap aset tetap, terdapat Aset dengan nilai diatas Rp 10.000.000 yang tidak tercatat sebagai aset sebagai berikut:

101080102 Uang Muka Pekerjaan Non Operasional

Tanggal	Kode Voucher	Keterangan	Jumlah	Nama Cabang
20-Aug-21	1506/08/2021/MDR 00048	uang muka pembelian 2 Ipad dan 1 PC	60.000.000	PUSAT

B. Aset dengan Umur Lebih dari 1 (satu) Tahun yang Langsung Dibebankan

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap aset tetap, terdapat aset dengan umur lebih dari satu tahun yang langsung dibebankan sebagai berikut:

Tanggal	Kode Voucher	Keterangan	Jumlah	Nama Cabang
28-Sep-21	1506/08/2021/MDR 00048-REV2	FAA.2021.09.00005 PEMBELIAN PRINTER L3110	3.450.000	PUSAT
28-Sep-21	1506/08/2021/MDR 00048-REV2	FAA.2021.09.00004 PEMBELIAN PRINTER L6160	4.950.000	PUSAT
28-Sep-21	1506/08/2021/MDR 00048-REV2	FAA.2021.09.00003 ASUS A416JAO-FHD352 GREY I3-1005G1 4GB SSD512GB WD SN : M7NOCX060507270	8.400.000	PUSAT
28-Oct-21	JU.0207/10/2021/MDN	Membukukan Pembelian Inventaris 1 Pcs Timbangan untuk di Gudang Teh Kota Bangun ord 60/EXP/X/2021	7.088.300	MEDAN

C. Tidak Terdapat Asuransi untuk Aset Tetap

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada aset tetap, tidak terdapat asuransi yang mengcover seluruh aset.

D. Aset Tetap yang Tidak Masuk Dalam List Aset

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap aset tetap, terdapat aset yang tidak masuk ke list aset, contoh aset di Gudang kota bangun, sebagai berikut:

No	Deskripsi
1	1 unit printer Cannon MP 258
2	1 unit AC Samsung
3	1 unit Telephone

E. Aset Tetap Tidak Ada Nomor Inventaris

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap aset tetap, terdapat aset yang tidak ada nomor inventaris, sebagai berikut:

Nomor	Nama Aset	Cabang
NA	BRACKET TV STANDING UP TO 70 INC	Pusat
NA	HP 14S-CF2075TU	Pusat
NA	HP 14S-CF2075TU	Pusat
NA	SAMSUNG UHD SMART TV 55	Pusat
NA	PERANGKAT PENUNJANG IT (ACCESS POINT)	Pusat
NA	PERANGKAT PENUNJANG IT (PC)	Pusat
NA	IPAD AIR 4 WI-FI 256GB	Pusat
NA	PRINTER L3110	Pusat
NA	APPLE PENCIL 2ND GEN-ITP	Pusat
NA	PRINTER L6160	Pusat
NA	ASUS A416JAO-FHD352	Pusat
NA	APPLE SMART KEYBOARD	Pusat
NA	COVER KEYBOARD	Pusat
NA	SAMSUNG TAB S7 6/128	Pusat
NA	PRINTER EPSON L5190	Pusat

Kriteria

PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan:

- a. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas.

KD.31/KU.207/VTP-2016 TENTANG “REVISI SK NO.KD.54/KU.207/VTP-2015 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN” pada pasal ketiga tentang Inventaris (Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor) dibukukan sebagai aset tetap sebagai berikut:

1. Nilai perolehan per satuan inventaris sama atau lebih besar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2. Masa manfaat (penyusutan) selama 5 tahun
3. Inventaris yang nilai perolehannya dibawah Rp.10.000.000,- walaupun masa manfaatnya di atas 5 tahun, dicatat sebagai biaya yang ditangguhkan (Deferred Charge). Diamortisasi dibuat daftarnya secara ekstracontabel dan dibiayakan bertahap selama 2 (dua) tahun.

Akibat

- Adanya selisih pencatatan pada akun-akun neraca mencerminkan kurang baiknya administrasi dalam pencatatan yang dapat berakibat laporan keuangan tidak akurat dan kurang handal.
- Penghapusan aset secara langsung berakibat hilangnya controlling inventaris aset perusahaan.

Rekomendasi

Sebaiknya manajemen lebih konsisten dalam mencatat aset tetap sesuai dengan SKD yang ditetapkan.

Tanggapan Manajemen

Mohon manajemen memberikan tanggapan atas temuan ini.

5. PENGADAAN ASET TETAP YANG TIDAK MASUK ANGGARAN RKAP

Kondisi

Terdapat pembelian aset tetap di tahun 2021, namun tidak dianggarkan dalam RKAP sebesar Rp123.669.350 sebagai berikut:

TABEL RENCANA INVESTASI			
No	Rencana Investasi	RKAP 2021	Keterangan
I. TANAH/BANGUNAN			
1	Renovasi Bangunan Kantor Pusat Gedung Plaza Pasifik	1.500.000.000	Akan dipergunakan sebagai kantor pusat
	Jumlah I.	1.500.000.000	
II. IT			
1	Kantor Pusat	540.000.000	Penambahan Infrastruktur IT
	Jumlah II.	540.000.000	
	Jumlah I+II	2.040.000.000	

REALISASI INVESTASI		
Keterangan	Nilai	Cabang
1 Pcs BRACKET TV STANDING UP TO 70 INC	Rp2.700.000	Pusat
2 Pcs HP 14S-CF2075TU	Rp15.400.000	Pusat
1 Pcs SAMSUNG UHD SMART TV 55	Rp10.734.050	Pusat
3 Pcs PERANGKAT PENUNJANG IT (ACCESS POINT)	Rp5.775.000	Pusat
3 Pcs PERANGKAT PENUNJANG IT (PC)	Rp22.275.000	Pusat
1 Pcs IPAD AIR 4 WI-FI 256GB	Rp13.199.000	Pusat
1 Pcs PRINTER L3110	Rp3.450.000	Pusat
1 Pcs APPLE PENCIL 2ND GEN-ITP	Rp2.199.000	Pusat
1 Pcs PRINTER L6160	Rp4.950.000	Pusat
1 Pcs ASUS A416JAO-FHD352	Rp8.400.000	Pusat
1 Pcs APPLE SMART KEYBOARD	Rp3.999.000	Pusat
1 Pcs COVER KEYBOARD	Rp2.300.000	Pusat
1 Pcs SAMSUNG TAB S7 6/128	Rp13.000.000	Pusat
1 Pcs PRINTER EPSON L5190	Rp4.250.000	Pusat
1 Pcs Monitor Merk Dahua	Rp1.550.000	Medan
1 Pcs Timbangan	Rp7.088.300	Medan
2 Pcs Printer Canon MP287	Rp2.400.000	Medan
Total	Rp123.669.350	

Kriteria

Akibat

Pengadaan CAPEX tanpa adanya anggaran.

Rekomendasi

Sebaiknya manajemen menganggarkan terlebih dahulu jika ingin melakukan investasi

Tanggapan Manajemen

6. PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENDAPATAN DAN BEBAN

A. Pengakuan Pendapatan Melewati Cut Off

Kondisi

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan local handling antara Perusahaan dengan Progress Rail Locomotive Inc dan Dokumen terkait, terdapat pekerjaan yang dilaksanakan pada awal tahun 2022 di akui dalam laporan keuangan tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama Customer	No Invoice	Tanggal Invoice	BA Serah Terima	Nilai	
					USD	IDR
1	Progress Rail Locomotive Inc	41/IMP-S/PRL/I/2022	5 Januari 2022	4 Januari 2022	14.038	199.703.208

Kriteria

PSAK 72: Kontrak Pelanggan

Perseroan telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Perseroan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Akibat

Adanya ketidaksesuaian pada pencatatan pendapatan berakibat laporan keuangan tidak akurat dan kurang handal.

Rekomendasi

Sebaiknya manajemen melakukan pencatatan sesuai dengan tahun buku masing-masing sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang akurat dan handal pada tahun buku masing-masing.

Tanggapan Manajemen

7. PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENCATATAN PERPAJAKAN

A. Pembayaran Pajak Dan Kontrak Sewa Tidak Sesuai Dengan Kontrak

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, terdapat pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan kontrak sewa di Gudang Kota Bangun. Harga dari perjanjian sebesar Rp 266.666.666,- (sudah termasuk PPh). Rincian sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2	Kontrak						SPT		
		Jangka Waktu		Alamat	Harga	DPP	PPh Final	Jumlah Bruto	Tarif	PPh yang Dipotong
		Dimulai	Berakhir							
Tuan Darmandi Koman	Tuan Sarwinskyah	01-Mar-2021	01-Mar-2022	Jalan Medan-Belawan/Yos Sudarso, Kom L-Medan	266.666.666	242.424.242	24.242.424	266.666.666	10%	26.666.667

Kriteria

PSAK 73 tentang Sewa:

Sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa menyediakan informasi yang relevan yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak transaksi sewa pada posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

Akibat

Perusahaan mengeluarkan beban atas pajak PPh 4 (2) lebih besar daripada perjanjian kontrak.

Rekomendasi

Sebaiknya manajemen lebih memperhatikan detail perjanjian kontrak sehingga realisasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan tidak menimbulkan kerugian sepihak.

Tanggapan Manajemen

8. PENUTUPAN KSO

Kondisi

Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) antara VTP dengan SUCOFINDO telah habis masa berlakunya sesuai Perjanjian Kerja Sama Operasi No.A.409/HK.503/A.I adalah selama dua tahun sejak perjanjian ditandatangani, dimana perjanjian ini ditandatangani tanggal 28 Agustus 2019. Bulan September 2021 perjanjian atas kerja sama operasi sudah selesai mengingat tidak adanya addendum atas perjanjian, namun sampai berakhirnya perjanjian tidak ada RUPP mengenai kewajiban dan hak masing-masing, karena sesuai dengan pasal yang sama menyebutkan pemutusan perjanjian diputuskan dengan RUPP. Sampai Desember 2021 keputusan penutupan masih belum ada sehingga sesuai dengan Keputusan Sirkular RUPP tentang Perpanjangan Masa Berlaku Kerja Sama Operasi KSO SCO-VTP diperpanjang sampai tanggal 28 Februari 2022.

Kriteria

- Perjanjian KSO No. A. 409/HK.503/A.I, Pasal 12 tentang “JANGKA WAKTU DAN TERMINASI”
 4. Perjanjian Kerja Sama Operasi ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi ini.
 5. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi terhadap segala kinerja dan kegiatan operasional dari KSO SCI-VTP setiap 3 (tiga) bulan sekali dan hasil evaluasi akan dijadikan pertimbangan dalam RUPP.
 6. Pengakhiran dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Operasi ini diputuskan melalui RUPP.
 7. Bila terjadi perjanjian kerja sama operasi antara PARA PIHAK, maka asset yang dimiliki oleh KSO SCI-VTP akan dibagi nilainya masing-masing 50%.
 8. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini.
- Keputusan Sirkular Rapat Umum Para Pihak (RUPP) PT SUCOFINDO (Persero) & PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero) Tentang Perpanjangan Masa Berlaku Kerja Sama Operasi KSO SCI-VTP tanggal 26 Oktober 2021, dengan hasil kesepakatan:
 1. Menetapkan masa berlaku Kerja Sama Operasi Kegiatan Manajemen Logistik & Transportasi antara PT Sucofindo (Persero) dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.
 3. Penetapan Perpanjangan Masa Berlaku KSO SCI-VTP dimaksudkan untuk audit dan penyelesaian tagihan serta administrasi yang meliputi:
 - a. Audit Bersama Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Sucofindo (Persero) dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
 - b. Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Laporan Keuangan KSO SCI-VTP tahun buku per 31 Desember 2021.
 4. Dalam perpanjangan Masa Berlaku KSO SCI-VTP tidak diperkenankan melakukan kegiatan operasional.

Akibat

Belum berakhirnya perjanjian mengakibatkan hak dan kewajiban antara PARA PIHAK belum dapat diputuskan sampai dengan 31 Desember 2021.

Rekomendasi

Tanggapan Manajemen

Mohon manajemen memberikan tanggapan atas temuan ini

II. TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT TAHUN LALU

1. REVALUASI ASET TETAP 2019 BELUM DILAKUKAN SECARA KESELURUHAN UNTUK KELOMPOK ASET YANG SAMA DAN BELUM DILAPORKAN PAJAK

Kondisi:

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan penilaian Kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah dan bangunan seluruh cabang. Akan tetapi revaluasi tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh untuk semua kelas/kelompok aset tetap yang sama pada cabang tertentu. Tanah yang belum dilakukan revaluasi, diantaranya:

Cabang	Keterangan tanah	Tahun perolehan	Harga perolehan
Surabaya	Tanah 780 m2 & Bangunan 360 m2 Ex. Tg. Wangi.	14-04-93	40.000.000
Perwakilan Cirebon	Jl. Kesenden III/126 Gd. Kesenden 263 M2	1977	7.685.000

Selain itu, atas revaluasi tersebut, Perusahaan belum menghitung dan melaporkan nilai pajak yang berlaku. Perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetap dengan menggunakan nilai pasar wajar berdasarkan 2 (dua) Kantor Jasa Penilai yaitu Laporan No.001610/2.00055-17/PI/10/0285/ XXI/2019 tanggal 24 Juli 2019 oleh KJPP Toto Suharto & Rekan Cabang Bekasi yang ditandatangani oleh Ade Rizki Pratama dan Laporan No.00264/2.0051-00/PI/05/0152/1/ VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan yang ditandatangani oleh Abdullah Fitriantoro. Selisih nilai revaluasi sebesar Rp234.353.771.820 atas revaluasi tersebut perusahaan belum mencatat kewajiban pajak final sebesar 10% dari nilai selisih revaluasi tersebut.

Terdapat potensi kerugian sebesar Rp23.435.377.182 akibat belum mencatat beban dan hutang pajak final PPh pasal 4 ayat 2 atas selisih revaluasi aset tetap.

Kriteria:

- PSAK 16 – Aset tetap

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.

- PSAK 46 – Pajak penghasilan

51B. Jika liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan timbul dari aset yang tidak disusutkan yang diukur menggunakan model revaluasi sesuai PSAK 16, maka pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan jumlah tercatat aset yang tidak disusutkan melalui penjualan, terlepas dari dasar untuk mengukur jumlah tercatat aset tersebut.

Dengan demikian, jika peraturan perpajakan menentukan tarif pajak yang berlaku terhadap jumlah kena pajak yang berasal dari penjualan aset yang berbeda dari tarif pajak yang berlaku terhadap jumlah pajak yang berasal dari penggunaan aset, maka tarif pajak berlaku terhadap penjualan aset diterapkan dalam mengukur liabilitas atau aset pajak tangguhan yang terkait dengan aset yang tidak disusutkan.

Akibat:

Ketidakkonsistenan pengakuan harga perolehan aset tetap. Untuk aset yang sudah dilakukan revaluasi, pengakuan harga perolehan menggunakan nilai revaluasi, sedangkan aset tetap yang belum dilakukan revaluasi masih menggunakan harga perolehan yang sama.

Rekomendasi:

Untuk pencatatan pengakuan aset tetap, sebaiknya manajemen menentukan harga secara konsisten.

Tanggapan Manajemen:

Tanah masih dalam proses balik nama dan akan dilakukan penilaian pada tahun 2021.

Tindak Lanjut:

DRAFT